

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI
PUBLIK MELALUI PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
SRIWIJAYA NOMOR 01 TAHUN 2023 PADA PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

TESIS

Sebagai salah satu syarat Untuk Memperoleh Gelar

Magister Sains (M.Si)

Pada

Program Studi Magister Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Sriwijaya

oleh :

Frima Yudi

NIM. 07012682226021



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN TESIS

Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Melalui Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 01 Tahun 2023 Pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Universitas Sriwijaya

Nama Mahasiswa : FRIMA YUDI

NIM : 07012682226021

Program Studi : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

Bidang Kajian Utama : KEBIJAKAN PUBLIK

Menyetujui,



Dr. Andries Lionardo, M.Si.
Pembimbing Pertama



Dr. Raniasa Putra, M.Si.
Pembimbing Kedua

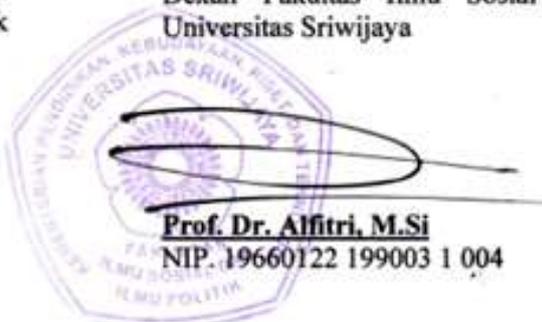
Mengetahui,

Koordinator Program Studi
Magister Administrasi Publik



Dr. Raniasa Putra, M.Si.
NIP. 197805122002121000

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 19660122 199003 1 004

HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Melalui Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 01 Tahun 2023 Pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Universitas Sriwijaya

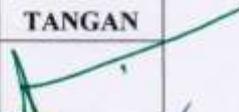
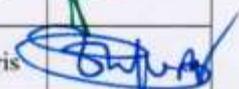
Nama Mahasiswa : Frima Yudi

NIM : 07012682226021

Program Studi : Magister Administrasi Publik

Bidang Kajian Utama : Kebijakan Publik

Tanggal Ujian : 6 Desember 2024

NO.	NAMA DOSEN	TIM PENGUJI	TANDA TANGAN
1	Dr. Andries Lionardo, M.Si.	Ketua	
2	Dr. Raniasa Putra, M.Si.	Sekretaris	
3	Prof. Dr. Sriati, M.S.	Anggota	
4	Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA.	Anggota	
5	Prof. Paisol Burlian, S.Ag., M.Hum.	Anggota	

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Alfitri, M.Si.
NIP. 19660122 199003 1 004

Palembang, Desember 2024
Menyetujui,
Koordinator Program Studi
Magister Administrasi Publik



Dr. Raniasa Putra, M.Si.
NIP. 197805122002121000

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Frima Yudi
NIM : 07012682226021
Tempat / Tanggal lahir : Palembang 7 Agustus 1986
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Bidang Kajian Utama : Kebijakan Publik
Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik
Melalui Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 01
Tahun 2023 Pada Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Universitas Sriwijaya

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti ketidakbenaran tersebut diatas, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, Desember 2024



Frma Yudi
NIM 07012682226021

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Frima Yudi
NIM : 07012682226021
Program Studi : Magister Administrasi Publik
Fakultas : Ilmu Sosial Ilmu Politik

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Sriwijaya dan/atau Program Studi Magister Administrasi Publik. **Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty- Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Melalui Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 01 Tahun 2023 Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Universitas Sriwijaya”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif ini Universitas Sriwijaya dan/atau Program Studi Magister Administrasi Publik berhak menyimpan, mengakhiri media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Palembang

Pada Tanggal : Desember 2024

Yang Menyatakan,



Frma Yudi

NIM 07012682226021

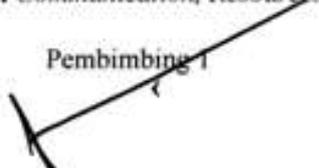
ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF PUBLIC INFORMATION DISCLOSURE POLICY THROUGH SRIWIJAYA UNIVERSITY RECTOR REGULATION NUMBER 01 OF 2023 ON INFORMATION AND DOCUMENTATION MANAGEMENT OFFICIALS (PPID) IN SRIWIJAYA UNIVERSITY

Scientific Paper in the Form of a Thesis, December 2024
Frima Yudi; supervised by Dr. Andries Lionardo, M.Si, and Dr. Raniasa Putra, S.IP.,M.Si
xx + 159 pages, 4 tables, 13 figures, and 40

This research is entitled "Implementation of Public Information Disclosure Policy Through Sriwijaya University Rector Regulation Number 01 of 2023 on Information and Documentation Management Officials (PPID) in Sriwijaya University". Qualitative method is a research method used in social sciences with a qualitative approach. Data collection techniques using (Sugiyono, 2014: 224) as follows: interview, observation, and documentation study. The results of this study show that communication in the communication process related to the implementation of PPID in Sriwijaya University is only done once, and there is no continuity in coordination related to the implementation of PPID Faculty so that the obstacles and obstacles that occur lack feedback due to lack of communication so that the implementation becomes hampered or neglected. Resources, limited budgets lead to facilities such as computers and special rooms for PPIDs and so on, which hamper the effectiveness of staff work. In addition, budget limitations also affect human resources at the Faculty PPID, causing information management to still depend on faculty administrative staff. Disposition, lack of availability of human resources, facilities, and infrastructure to support the implementation of activities. And the policy maker does not provide incentives or bonuses to employees or policy implementers. This is influenced by the absence of budget allocations due to budget constraints. The PPID bureaucratic structure of each faculty makes its own procedures that are integrated with the SOP of PPID Sriwijaya University.

Keywords: *Communication, Resources, Disposition, Bureaucratic Structure*

Pembimbing 1

Dr. Andries Lionardo, M.Si

Pembimbing 2

Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si

Mengetahui Koordinator Program Studi
Magister Administrasi Publik



Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si
NIP. 19780512 200212 1 003



ABSTRAK

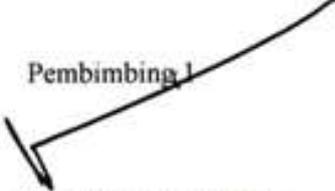
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA NOMOR 01 TAHUN 2023 PADA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Karya Tulis Ilmiah berupa Tesis, Desember 2024

Frima Yudi; dibimbing oleh. Dr. Andries Lionardo, M.Si dan Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si
xx + 159 halaman, 4 tabel, 13 Gambar dan 40 Lampiran

Penelitian ini berjudul "Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Melalui Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 01 Tahun 2023 Pada Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPiD) Di Lingkungan Universitas Sriwijaya". Metode kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan pada ilmu-ilmu sosial dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan (Sugiyono, 2014:224) sebagai berikut: wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komunikasi, pada proses komunikasi terkait adanya pelaksanaan PPID di lingkungan Universitas Sriwijaya ini hanya dilakukan sekali, dan tidak ada keberlanjutan dalam koordinasi terkait pelaksanaan PPID Fakultas sehingga kendala dan hambatan yang terjadi kurang mendapat umpan balik akibat kurangnya komunikasi sehingga pelaksanaan menjadil terhambat/terbengkalai. Sumber Daya, Terbatasnya anggaran menyebabkan fasilitas seperti komputer dan ruang khusus untuk PPID dan lain sebagainya, yang menghambat efektivitas kerja staf. Selain itu, keterbatasan anggaran juga berpengaruh pada sumber daya manusia di PPID fakultas menyebabkan pengelolaan informasi masih bergantung pada staf administrasi fakultas. Disposisi, kurangnya ketersediaan sumber daya manusia, sarana dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan. Serta pihak pembuat kebijakan tidak memberikan insentif atau bonus kepada pegawai atau pelaksana kebijakan, hal tersebut dipengaruhi oleh tidak adanya alokasi anggaran karena keterbatasan anggaran. Struktur Birokrasi PPID masing-masing fakultas membuat prosedur sendiri yang terintegrasi dengan SOP PPID Universitas Sriwijaya.

Kata Kunci: Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, Struktur Birokrasi

Pembimbing 1

Dr. Andries Lionardo, M.Si

Pembimbing 2

Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si

Mengetahui Koordinator Program Studi
 Magister Administrasi Publik

Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si
 NIP. 19780512 200212 1 003

SUMMARY

Sriwijaya University is one of the institutions that has a commitment to implementing public information disclosure. Sriwijaya University has a vision of becoming a leading and research-based university that excels in various fields of science, technology, and art by 2025. In order to carry out the mandate of Law No. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure (KIP), it is the duty and every public body to adopt and regulate public schemes to support its goals. Public schemes facilitate news that supports information, plays an important role and provides wider and more transparent openness in the public sector.

Based on initial observations and field facts, in its implementation it shows that the information service system and public information disclosure in each faculty have not been running. In fact, related to this assignment, it has been instructed as a development of the University PPID information center to its derivatives, namely each faculty within Sriwijaya University. Each Information and Documentation Management Officer in each faculty still has many obstacles, both from human resources, facilities and infrastructure, and so on. Then, an analysis and conclusion was drawn on several problems that occurred in the field with an analysis of communication indicators, dispositions, resources, and bureaucratic structures.

With research related to the Implementation of Public Information Disclosure Policy through the Rector of Sriwijaya University Regulation Number 01 of 2023 on Information and Documentation Management Officials (PPID) within Sriwijaya University. After the problems and data that occurred in the field were known related to some of these indicators. Furthermore, the results and discussions obtained that the communication process related to the implementation of PPID in the Sriwijaya University Environment was only carried out once and there was no sustainability in coordination related to the implementation of the Faculty PPID so that the obstacles and obstacles that occurred did not get feedback due to the lack of communication so that the implementation was hampered.

Limited resources and budgets cause facilities such as computers and special rooms for PPID to hinder the effectiveness of staff work. In addition, budget limitations cause information management to depend on the faculty administrative staff. Furthermore, the disposition occurs due to the lack of human resources, facilities, and infrastructure to support the implementation of activities. And policymakers do not provide incentives or bonuses to employees due to budget shortfall. Finally, the PPID bureaucratic structure of each faculty makes its own procedures that are integrated with the SOP of PPID Sriwijaya University.

RINGKASAN

Universitas Sriwijaya merupakan salah satu Lembaga yang mempunyai komitmen dalam menerapkan keterbukaan informasi publik. Universitas Sriwijaya memiliki visi Menjadi Perguruan Tinggi terkemuka dan berbasis riset yang unggul dalam berbagai bidang ilmu, teknologi, dan seni pada tahun 2025. Dalam rangka mengemban amanah Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka sudah menjadi tugas dan setiap badan publik untuk mengadopsi dan mengatur skema publik demi mendukung tujuannya tersebut. Skema publik memfasilitasi pemberitaan yang mendukung informasi, memainkan peranan penting dan memberikan keterbukaan yang lebih luas dan transparan dalam sektor publik.

Berdasarkan observasi awal dan fakta lapangan, dalam pelaksanaannya menunjukkan belum berjalannya sistem layanan informasi dan keterbukaan informasi publik di setiap fakultas. Padahal, terkait penugasan tersebut sudah di intruksikan sebagai pengembangan dari pusat informasi PPID Universitas kepada turunannya yaitu masing-masing fakultas di lingkungan universitas sriwijaya. Masing-masing Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap fakultas masih banyak kendala baik itu dari sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Lalu, dilakukan analisis dan penarikan kesimpulan terhadap beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan dengan analisis indikator komunikasi, disposisi, sumberdaya, dan struktur birokrasi.

Dengan adanya Penelitian terkait Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik melalui Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 01 Tahun 2023 Pada Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi (PPID) di Lingkungan Universitas Sriwijaya. Setelah diketahui permasalahan dan data yang terjadi di lapangan terkait beberapa indikator tersebut. Selanjutnya hasil dan pembahasan yang diperoleh bahwa proses komunikasi terkait adanya pelaksanaan PPID di Lingkungan Universitas Sriwijaya hanya dilakukan sekali dan tidak ada keberlanjutan dalam koordinasi terkait pelaksanaan PPID Fakultas sehingga kendala dan hambatan yang terjadi kurang mendapatkan umpan balik akibat kurangnya komunikasi sehingga pelaksanaan menjadi terhambat. Sumberdaya,

terbatasnya anggaran menyebabkan fasilitas seperti komputer dan ruang khusus untuk PPID menghambat efektivitas kerja staf. Selain itu keterbatasan anggaran menyebabkan pengelolaan informasi bergantung pada staf administrasi fakultas. Selanjutnya, disposisi terjadi akibat kurangnya sumber daya manusia, sarana, dan prasarana sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan. Serta pihak pembuat kebijakan tidak memberikan insentif atau bonus kepada pegawai akibat keterbatasan anggaran. Terakhir struktur birokrasi PPID masing-masing fakultas membuat prosedur sendiri yang terintegrasi dengan SOP PPID Universitas Sriwijaya.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur peneliti panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat serta karunia-Nya lah peneliti dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Melalui Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 01 Tahun 2023 Pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Di Lingkungan Universitas Sriwijaya ini dengan baik. Shalawat beserta salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi persyaratan kelulusan di Program Studi Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sriwijaya. Peneliti tentunya mendapatkan bantuan oleh berbagai pihak dalam penyusunan tesis ini agar dapat diselesaikan secara efektif dan efisien, sehingga bisa menjadi penelitian yang memberikan manfaat bagi orang lain. Ucapan syukur dan terima kasih peneliti disampaikan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan lancar.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE, IPU, MKU, APEC ENG Rektor Universitas Sriwijaya Periode 2019-2023 yang telah memberikan izin belajar dan beasiswa dalam menumpuh studi di Program Studi Magister Administrasi Publik Fisip Unsri.
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa., S.E., M.Si sebagai Rektor Universitas Sriwijaya yang telah memberikan dukungan , beasiswa serta motivasi kepada saya dalam penyelesaian tesis ini.
4. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisip) Universitas Sriwijaya.

5. Dr. Andries Lionardo, M.Si sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan sekaligus dosen pembimbing kesatu yang telah banyak membantu dalam memberikan arahan selama penelitian dan penyusunan tesis ini.
6. Dr. Raniasa Putra, S.IP., M.Si. sebagai Koordinator Program Studi Magister Administrasi Publik sekaligus dosen pembimbing kedua yang telah banyak membantu dalam memberikan arahan selama penelitian dan penyusunan tesis ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi di Program Studi Magister Administrasi Publik Fisip Universitas Sriwijaya.
8. Teman-teman seperjuangan di Prodi Magister Administrasi Publik terkhusus angkatan 2022 yang telah kebersamai peneliti selama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan.
9. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung peneliti dalam penelitian dan penyusunan tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu mencurahkan taufiq, rahmat, dan hidayah Nya kepada kita semua.

Palembang, Desember 2024

Penulis,



Frma Yudi

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh kerendahan hati dan syukur yang mendalam, karya ini dipersembahkan kepada;

- ✓ Allah SWT, Sang Pencipta, yang dengan segala Rahmat dan kasih sayang-Nya, telah memberi ridha dan membimbing setiap langkahku. Hanya dengan izin Allah SWT semua nya ini dapat terwujud .
- ✓ Kedua orang tuaku tercinta, Papa Farizal, HB dan Mama Yani yang tiada henti memberikan semangat, nasihat, cinta kasih sayang serta pengorbanan yang tiada henti berdoa agar anak nya cepat tamat kuliah dan wisuda. Segala pencapaian ini takkan pernah terwujud tanpa nasihat dan doa restumu.
- ✓ Kedua Mertuaku tercinta, Ayah Sayuti dan Ibu Amwati yang tiada henti memberikan support, doa dan nasihat serta waktunya untuk menjaga / merawat anak (cucu) sepanjang menumpuh studi dan bekerja. Segala pencapaian ini takkan pernah terwujud tanpa pengorbanan, nasihat dan doa restumu.
- ✓ Istriku Tersayang, Sulistianingsih, A.MAK yang selalu hadir menemani memberikan kekuatan suka dan duka , cinta kasih sayang dan dukungan yang tiada henti berdoa agar suami nya cepat tamat dan wisuda. Segala perjuangan Ayah hingga titik ini saya persembahkan padamu yang berharga dalam hidupku. Terima kasih telah menjadi pasangan yang saling menyempurnakan.
- ✓ Anakku Tersayang, Alif Alfatih dan Afiza Ramadhani yang selalu tersita waktunya untuk berkumpul, bermain, jalan- jalan bersama keluarga namun senyum dan tawa kalian lah yang membuat ayah selalu terus berjuang, Semoga segala usaha ini menjadi awal dari masa depan yang cerah dan penuh berkah bagi kalian.

“Bahagia bukan soal hidup yang sempurna, melainkan saat bisa menikmati dan mensyukuri atas apa yang telah diterima. Kesuksesan kita datang ketika kita menghargai kekuatan satu sama lain, maka jadilah Manusia yang bermanfaat bagi semua orang ”.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama lengkap Frima Yudi, Lahir di kota Palembang pada tanggal 7 Agustus 1986, Anak Pertama dari Tiga Saudara, saya memiliki seorang istri bernama Sulistianingsih dan memiliki 2 orang anak yang bernama Alif Alfatih dan Afiza Ramadhani. Penulis menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 153 di kota Palembang lulus pada Tahun 1998, selanjutnya menyelesaikan jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 di kota Palembang lulus pada Tahun 2001, selanjutnya menyelesaikan jenjang Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) PGRI 2 kota Palembang lulus pada Tahun 2004.

Penulis kemudian melanjutkan studi ke jenjang Strata -1 di Universitas Palembang pada Fakultas Ekonomi jurusan Manajemen lulus tahun 2011. Pada Tahun 2014 penulis diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), saat ini penulis bertugas di Perguruan Tinggi Negeri Universitas Sriwijaya. Selanjutnya pada tahun 2022 penulis melanjutkan studi ke jenjang Strata-2 pada program studi Magister Administrasi Publik (MAP) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya lulus pada tahun 2025.

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN PERSTEUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK ENGLISH	v
ABSTRAK INDONESIA.....	vi
SUMARY	vii
RINGKASAN	viii
KATA PENGANTAR.....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL	xivii
DAFTAR GAMBAR.....	xiviii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	16
BAB II	Error! Bookmark not defined.
TINJAUAN PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
A. <i>Good Governance</i>	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Informasi, Informasi Publik dan Badan Publik	Error! Bookmark not defined.
2. Tujuan Keterbukaan Informasi Publik.....	Error! Bookmark not defined.
3. Pengelolaan Informasi, Mekanisme Memperoleh Informasi dan Mekanisme Keberatan Informasi.....	Error! Bookmark not defined.
B. Kebijakan Publik	Error! Bookmark not defined.
C. Implementasi Kebijakan Publik	Error! Bookmark not defined.
D. Model Implementasi Kebijakan	Error! Bookmark not defined.
E. Penelitian Terdahulu.....	Error! Bookmark not defined.
F. Teori Yang Digunakan	Error! Bookmark not defined.
1. Komunikasi.....	Error! Bookmark not defined.
2. Sumberdaya	Error! Bookmark not defined.

3. Disposisi	Error! Bookmark not defined.
4. Struktur birokrasi	Error! Bookmark not defined.
G. Kerangka Pemikiran	Error! Bookmark not defined.
BAB III.....	Error! Bookmark not defined.
METODE PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Jenis Penelitian	Error! Bookmark not defined.
A. Fokus Penelitian	Error! Bookmark not defined.
B. Lokasi Dan Situs Penelitian	Error! Bookmark not defined.
C. Jenis Dan Sumber Data	Error! Bookmark not defined.
D. Teknik Pengumpulan Data	Error! Bookmark not defined.
E. Instrument Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
F. Teknik Analisi Data.....	Error! Bookmark not defined.
G. Keabsahan Data	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Gambaran Umum Universitas Sriwijaya.	Error! Bookmark not defined.
1. Sejarah Universitas Sriwijaya	Error! Bookmark not defined.
2. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas Sriwijaya	Error! Bookmark not defined.
3. Tujuan Universitas Sriwijaya	Error! Bookmark not defined.
4. Sasaran Universitas Sriwijaya.....	Error! Bookmark not defined.
B. Gambara Umum PPID Universitas Sriwijaya dan Fakultas.....	Error! Bookmark not defined.
1. Profil PPID Universitas Sriwijaya	Error! Bookmark not defined.
2. Kewajiban Badan Publik.....	Error! Bookmark not defined.
3. Peran Perguruan Tinggi dalam Keterbukaan Informasi Pembentukan PPID	Error! Bookmark not defined.
4. Pembentukan PPID fakultas dilingkungan Universitas Srwijaya	Error! Bookmark not defined.
5. Struktur Organisasi PPID Universitas dan di Lingkungan Universitas Sriwijaya	Error! Bookmark not defined.
BAB V.....	Error! Bookmark not defined.
HASIL DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.
A. Komunikasi	Error! Bookmark not defined.
1. Transmisi Dalam Penyampaian Informasi	Error! Bookmark not defined.
2. Kejelasan Informasi Yang Di Sampaikan.....	Error! Bookmark not defined.
3. Konsistensi Informasi.....	Error! Bookmark not defined.
B. Sumber Daya	Error! Bookmark not defined.

1. Sumber Daya Manusia	Error! Bookmark not defined.
2. Ketersediaan Fasilitas.....	Error! Bookmark not defined.
3. Sumber Daya Anggaran	Error! Bookmark not defined.
4. Wewenang Implementor	Error! Bookmark not defined.
C. Disposisi	Error! Bookmark not defined.
1. Pengangkatan Birokrat	Error! Bookmark not defined.
2. Pemberian Insentif	Error! Bookmark not defined.
D. Struktur Birokrasi	Error! Bookmark not defined.
1. Standar Operasional Prosedur	Error! Bookmark not defined.
2. Fragmentasi	Error! Bookmark not defined.
BAB VI	Error! Bookmark not defined.
KESIMPULAN DAN SARAN	Error! Bookmark not defined.
A. Kesimpulan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	18

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Daftar Nama Fakultas di Lingkungan Universitas Sriwijaya	8
Tabel 1.2. Daftar Informasi Publik Universitas Sriwijaya tahun 2023	10
Tabel 1.3. Daftar informasi yang dikecualikan	11
Tabel 2.4. Penelitian Terdahulu	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Pilagam Pelnghargaan Keltelrbukaan Informasil Publiik Tahun 2021 Unilvelrsiltas Srilwiljaya	5
Gambar 1. 2 Pilagam Pelnghargaan Keltelrbukaan Informasil Publiik Tahun 2022 Unilvelrsiltas Srilwiljaya.....	5
Gambar 1. 3 Pilagam Pelnghargaan Keltelrbukaan Informasil Publiik Tahun 2023 Unilvelrsiltas Srilwiljaya.....	6
Gambar 1. 4 SK Relktor Telntang PPIID dil Lilngkungan Unilvelrsiltas Srilwiljaya	7
Gambar 1. 5 Alur Pelrmohonan Informasi.....	12
Gambar 1. 6 Website PPID Fakultas FKM Universitas Sriwijaya	14
Gambar 2.7. Model Implementasi Kebijakan Publik Edward III	31
Gambar 2.8. Kerangka Pemikiran.....	37
Gambar 4. 9. Sruktur organisasi PPID Universitas dan di Lingkungan Universitas Sriwijaya	58
Gambar 5.10. SK Relktor selbagai ilnstruksil pelngelolaan PPIID Fakultas.....	62
Gambar 5.11. Welbsitel Fakultas Kelselhatan masyarakat.....	69
Gambar 5.12.Kondilsil ruang layanan Informasil Fakultas	72
Gambar 5.13. Prosels wawancara delngan Wakill Delkan 2 Bildang Umum, Kelungan dan Kelpelgawailan Fakultas Pelrtanilan	80

DAFTAR SINGKATAN

PPID	: Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID)
SOP	: Standar Operasional prosedur
PP	: Peraturan Pemerintah
KIP	: Keterbukaan Informasi Publik

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bagi suatu negara yang berdasarkan hukum atau peraturan-peraturan dalam setiap pemerintahannya, warga negaranya wajib tunduk dalam aturan-aturan yang ada di negara tersebut. Hukum yang diciptakan menjamin dan melindungi hak-hak warganya, baik dibidang sipil dan politik maupun dibidang sosial, ekonomi dan budaya. Untuk melindungi hak setiap warga, pemerintah harus melayani hak – hak warga dengan baik agar terbentuk negara yang sejahtera. Pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban utama bagi pemerintah. Peranan pemerintah dalam proses pemberian pelayanan, adalah bertindak sebagai katalisator yang mempercepat proses sesuai dengan apa yang seharusnya. Dengan diperankannya pelayanan sebagai katalisator. Hal tersebut tentu saja akan menjadi tumpuan organisasi pemerintah dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu, pelayanan yang diberikan oleh pemerintah sebagai penyedia jasa pelayanan kepada masyarakat sangat ditentukan oleh kinerja pelayanan yang diberikan. Sejauh mana pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat terjangkau, mudah, cepat, dan efisien baik dari sisi waktu maupun pembiayaannya.

Berdasarkan Keputusan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, definisi dari pelayanan umum adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang- undangan. Menurut Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 UU Nomor 25 Tahun 2009, yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam memenuhi konteks

pelayanan public yang baik adalah melalui Salah satu pembahasan menarik adalah terkait dengan keterbukaan informasi kepada Masyarakat luas.

Salah satu perbincangan demokratisasi di Indonesia adalah keterbukaan informasi publik. Indonesia memulai sebuah momentum baru dalam era keterbukaan terkait dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang bertujuan untuk memberikan dan menjamin hak setiap orang untuk mendapatkan informasi publik. Keterbukaan informasi publik merupakan sarana mewujudkan pemerintahan yang baik dan demokratis sekaligus sebagai sarana pengawasan masyarakat terhadap kebijakan publik. Secara fundamental, informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.

Dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, perlu adanya transparansi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Transparansi merupakan salah satu prinsip *Good Governance* (kepemerintahan yang baik) yang bertujuan untuk menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintahan dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi. Transparansi informasi diperlukan agar pengawasan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan negara dapat dilakukan secara obyektif. (Nurtjahjawilasa et al., 2015)

Good Governance adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik secara umum. Terdapat beberapa karakteristik atau prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam penyelenggaraan *Good Governance*. Syarat bagi terciptanya *Good Governance*, yang merupakan prinsip dasar meliputi partisipatoris, *rule of law*, transparansi, *responsiveness*, *consensus*, persamaan hak, efektif dan efisiensi dan akuntabilitas. Keterbukaan informasi akan mendorong partisipasi publik yang merupakan unsur penting dari *Good Governance*. Partisipasi publik sangat penting dalam mendorong kelancaran proses pembangunan. Oleh karena itu, keterbukaan

informasi mengharuskan adanya transparansi informasi tentang penyelenggaraan negara terhadap masyarakat, khususnya terkait dengan segala informasi berkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan untuk mewujudkan terciptanya pembangunan yang lebih baik.

Keterbukaan informasi saat ini menjadi hal yang begitu esensial bagi kehidupan bermasyarakat. Akses publik terhadap layanan publik di lembaga/badan publik juga sudah semakin tinggi urgensinya, oleh karena itu pemerintah telah membuat Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi untuk memenuhi kebutuhan akan informasi tersebut. Selanjutnya di tahun 2010 pemerintah menetapkan peraturan pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, diikuti dengan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi peranan penting untuk menyelenggarakan negara dan juga salah satu pilar pemerintahan yang demokratis, perlu adanya tranparansi demi meningkatkan kepercayaan dari masyarakat untuk pemerintah. Bersamaan dengan hal tersebut, keterbukaan informasi juga meningkatkan responsif terhadap masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan publik, karena partisipasi masyarakat tidak berarti tanpa adanya jaminan keterbukaan informasi publik. (KIP) ini juga menjadi faktor dorongan demi terciptanya Pemerinthan yang bersih dan baik karena pemerintah dan badan publik diwajibkan untuk menyediakan informasi lengkap mengenai kegiatan-kegiatan pemerintah secara transparan, terbuka dan akuntabel.

Perihal penting yang harus di lakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengimplementasikan UU KIP, perlu adanya pembentukan tim khusus guna melayani keperluan masyarakat serta mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar. Tim tersebut adalah PPID (pejabat pengelola informasi dan dokumentasi) yang ditunjuk secara langsung oleh Badan Publik ataupun Pemerintah Daerah. Keberadaan PPID mengartikan dimana keseriusan Badan Publik untuk membawa era keterbukaan informasi. Dalam konteks pelayanan, PPID sebagai garda utama yang akan berhadapan dengan

masyarakat secara langsung, terkait dengan informasi yang ingin diminta oleh masyarakat maupun memberikan tanggapan terhadap keberatan yang diajukan oleh masyarakat. Dalam hal inilah peran PPID sangat penting karena dapat menjadi akses terdepan/fasilitator penyampaian informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sesuai dalam Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang (KIP), yaitu pada PP Nomor 61 Tahun 2010 pasal 1 ayat (4) “Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Badan Publik”. Adanya undang-undang tentang keterbukaan informasi publik adalah hal yang penting karena melindungi dan menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi.

Universitas Sriwijaya merupakan salah satu Lembaga yang mempunyai komitmen dalam menerapkan keterbukaan informasi publik. Universitas Sriwijaya memiliki visi Menjadi Perguruan Tinggi terkemuka dan berbasis riset yang unggul dalam berbagai bidang ilmu, teknologi, dan seni pada tahun 2025. Dalam rangka mengemban amanah Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) maka sudah menjadi tugas dan setiap badan publik untuk mengadopsi dan mengatur skema publik demi mendukung tujuannya tersebut. Skema publik memfasilitasi pemberitaan yang mendukung informasi, memainkan peranan penting dan memberikan keterbukaan yang lebih luas dan transparan dalam sektor publik.

Dalam pelaksanaannya, dari tahun 2021 - 2023 PPID Universitas Sriwijaya selalu meraih penghargaan pada ajang Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagai Perguruan Tinggi Negeri (PTN) kategori “Informatif” yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Penghargaan tersebut sebagai bentuk apresiasi terhadap komitmen Badan Publik dalam mendorong keterbukaan informasi publik yang sesuai dengan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang diberikan berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi (monev) tahunan yang dilakukan KIP. Sebagai informasi, monev yang dilakukan KIP menilai tingkat kepatuhan badan publik terhadap pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Tahun 2021 PPID Universitas Sriwijaya menerima penghargaan dari Komisi Informasi Pusat dengan peningkatan dari Kategori Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Publik Menuju Informatif menjadi Informatif.



Gambar 1.1 Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2021 Universitas Sriwijaya

Sumber: Diolah dari data sekunder oleh penulis, 2024

Tahun 2022 PPID Universitas Sriwijaya Kembali menerima penghargaan dari Komisi Informasi Pusat dengan Kategori Perguruan Tinggi Negeri sebagai Badan Publik Informatif.



Gambar 1.2. Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2022 Universitas Sriwijaya

Sumber: Diolah dari data sekunder oleh penulis, 2024

Tahun 2023 PPID Universitas Sriwijaya untuk yang ketiga kalinya menerima penghargaan dari Komisi Informasi Pusat dengan Kategori Perguruan Tinggi sebagai Badan Publik Informatif.



Gambar 1.3. Piagam Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023 Universitas Sriwijaya

Sumber: Diolah dari data sekunder oleh penulis, 2024

Dalam mencapai pelaksanaan keterbukaan informasi publik yang maksimal di Universitas Sriwijaya, maka Rektor Universitas mengeluarkan Surat Keputusan kepada masing-masing Fakultas di lingkungan Universitas Sriwijaya untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tingkat Utama dan Unit. Hal ini bertujuan supaya pusat layanan informasi di lingkungan Universitas Sriwijaya dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Peraturan Rektor adalah Peraturan Rektor merupakan naskah dinas yang bersifat mengatur yang dikeluarkan oleh Rektor sebagai pemimpin tertinggi perguruan tinggi. Keputusan Rektor merupakan naskah dinas yang dikeluarkan oleh Rektor yang memuat kebijakan yang bersifat menetapkan, tidak bersifat mengatur, dan merupakan pelaksanaan kegiatan, yang digunakan untuk menetapkan/mengubah status kepegawaian/persona keanggotaan/material/peristiwa, menetapkan/mengubah/membubarkan suatu kepanitiaan/tim, menetapkan pelimpahan wewenang. Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Universitas Sriwijaya ini ditandai oleh dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya

Nomor :0001/UN9/SK.BPHM.IH/2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Universitas Sriwijaya.



Gambar 1.4. SK Rektor Tentang PPID di Lingkungan Universitas Sriwijaya
Sumber: Diolah dari data sekunder oleh penulis, 2024

Surat Keputusan tersebut berisikan tentang pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Universitas Sriwijaya. Dalam surat tersebut masing-masing Fakultas diwajibkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi PPID sebagai berikut:

1. mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Universitas Sriwijaya
2. melakukan uji konsekuensi terhadap informasi publik yang dikecualikan;
3. menyediakan, mengumumkan, dan memberikan layanan informasi publik yang bersifat terbuka;
4. menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;
5. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Rektor, dan
6. melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Lingkungan Universitas Sriwijaya yang dimaksud antara lain:

1	Fakultas Ekonomi
2	Fakultas Hukum
3	Fakultas Teknik
4	Fakultas Kedokteran
5	Fakultas Pertanian
6	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
7	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
8	Fakultas Ilmu Komputer
9	Fakultas MIPA
10	Fakultas Kesehatan Masyarakat

Tabel 1.1. Daftar Nama Fakultas di Lingkungan Universitas Sriwijaya

Pada table tersebut terdapat sepuluh Fakultas di Lingkungan Universitas Sriwijaya yang harus mengembangkan dan mengelola terkait keterbukaan informasi publik yang di Kelola oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) tiap Fakultas. Adapun Struktur Organisasi yang harus di penuhi oleh masing-masing Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Fakultas adalah:

Susunan penyelenggara PPID Universitas Sriwijaya terdiri dari:

1. Atasan PPID
2. PPID Pelaksana
3. Tim Pertimbangan PPID
4. PPID Pelaksana Pembantu
5. Bidang Pelayanan Informasi
6. Bidang Perdokumentasian dan Pengelolaan Informasi
7. Bidang Penyelesaian Sangketa
8. Bidang Teknologi dan Informasi

Bidang Pelayanan Informasi bertugas:

1. Melaksanakan Penyampaian Informasi publik

2. Menyiapkan paket informasi yang mudah diberikan kepada pemohon informasi publik
3. Membantu tugas pengelolaan informasi public dan dokumentasi dilingkungan Universitas Sriwijaya

Bidang Pendokumentasian dan Pengelolaan Informasi bertugas:

1. Melakukan penyimpanan dan pendokumentasian seluruh informasi public yang berada di lingkungan Universitas Sriwijaya
2. Menghimpun data sumber daya Universitas Secara terpadu sesuai dengan perkembangan organisasi dan kebutuhan
3. Melakukan verifikasi untuk mengecek keabsahan data
4. Membantu tugas pengelolaan, penyampaian informasi public dan dokumentasi di Universitas Sriwijaya

Bidang Penyelesaian Sengketa bertugas:

1. Melakukan kajian hukum untuk menentukan penyelesaian sengketa informasi
2. Melakukan pendampingan dalam penyelesaian sengketa informasi
3. Membantu tugas pengelolaan informasi, penyampaian publik.

Bidang Teknologi informasi dan Komunikasi

1. Melakukan desain, pembangunan dan pengembangan WEBSITE PPID
2. Melakukan perawatan perangkat jaringan internet dan website PPID
3. Membantu melaksanakan pengelolaan layanan teknologi informasi

Hal tersebut merupakan tugas, fungsi dan struktur organisasi yang sudah dijelaskan Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 01 Tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Universitas Sriwijaya.

Dalam implementasi tugas dan fungsi (PPID) di Universitas Sriwijaya bertanggung jawab dalam melayani dan memberikan informasi yang dibutuhkan oleh publik. Berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 bab 3 Pasal 11-13 informasi yang wajib disediakan dan diumumkan oleh PPID adalah sebagai berikut:

DAFTAR INFORMASI PUBLIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA	
TAHUN 2023	
1	Informasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala
1.1	Informasi Profil Universitas Sriwijaya
1.2	Ringkasan Informasi tentang program dan kegiatan yang sedang dijalankan
1.3	Ringkasan Informasi tentang kinerja dalam lingkup Badan Publik berupa narasi tentang realisasi kegiatan yang telah maupun sedang dijalankan beserta capaiannya
1.4	Ringkasan Laporan Keuangan Universitas Sriwijaya
1.5	Laporan SIMAK BMN
1.6	Daftar MoU Kerjasama dalam dan luar negeri
1.7	Informasi tentang pengumuman pengadaan barang dan jasa sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait
1.8	Laporan Tahunan Pelayanan Informasi Publik , 2018, 2019, 2020, 2021, 2022
1.9	Statistik dan data Universitas Sriwijaya
2	Informasi yang Wajib Diumumkan secara Serta-merta
	Saat Ini, Universitas Sriwijaya belum ada Informasi Publik yang Wajib Disediakan Dan Diumumkan Secara Serta merta.
3	Informasi yang Wajib Tersedia Setiap Saat
3.1	Statuta Universitas Sriwijaya (Permen Ristekdikti No. 17 tahun 2018)
3.2	OTK Universitas Sriwijaya (Permen Ristekdikti No. 12 tahun 2015)
3.3	Sertifikat Akreditasi Program Studi di lingkungan Universitas Sriwijaya
3.4	Sertifikat Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi Universitas Sriwijaya
3.5	Daftar Informasi Publik Universitas Sriwijaya
3.6	Informasi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi Publik, Serta tata cara pengajuan keberatan serta penyelesaian sengketa informasi Publik
3.7	Informasi tentang Peraturan, Keputusan, Pedoman dan kebijakan di Universitas Sriwijaya
3.8	Peraturan Rektor Nomor : 0033.b/UN9/DN/2014 Tentang Pedoman

		Pengelolaan Kerja sama Universitas Sriwijaya
	3.9	Daftar Tenaga Ahli Akademik Universitas Sriwijaya (Kepakaran Dosen)
	3.10	Peta Kampus Universitas Sriwijaya
	3.11	Siaran pers dan dokumentasi lain

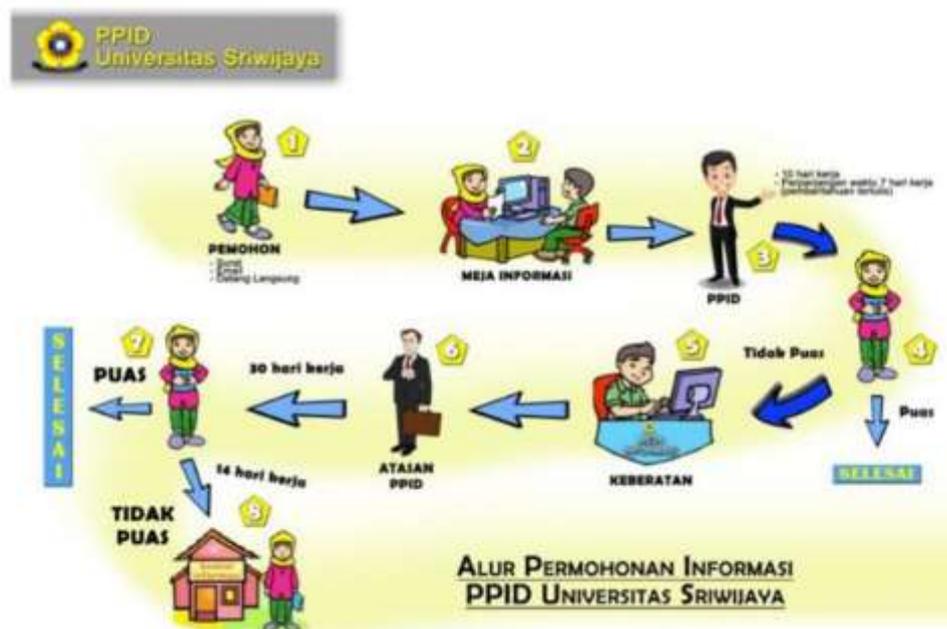
Tabel 1.2. Daftar Informasi Publik Universitas Sriwijaya tahun 2023

Dalam memberikan layanan informasi publik oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Sriwijaya juga mempunyai beberapa informasi yang dikecualikan atau tidak boleh sembarangan diakses oleh publik. Hal tersebut termasuk kedalam peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik pada bab 4 pasal 14-18. Adapun yang dimaksud dari informasi yang dikecualikan antara lain:

No	Usulan Informasi yang di Kecualikan
1	Dokumen Usulan Perencanaan Fisik dan Peralatan
2	Rincian Harga Perkiraan Sendiri Pada Proses Pengadaan Barang/Jasa
3	Dokumen Penawaran dari penyedia barang/jasa pada Proses Pengadaan barang/jasa
4	Data Pribadi Dosen dan Tenaga Kependidikan
5	Dokumen-dokumen dan Berita Acara Proses Pembinaan Aparatur (BINAP)
6	Hasil Proses Penjatuhan Hukuman Displin Pegawai
7	Rekam Medis Pasien
8	Rekap Nilai Studi Mahasiswa yang Terdapat pada Bagian Akademik
9	Penilaian dalam proses rekrutmen dan seleksi
10	Soal Tes Ujian Masuk
11	Kunci Jawaban Tes Ujian
12	Dokumen audit internal, laporan hasil audit internal dan laporan keuangan yang belum diaudit (unaudited)
13	Proposal Penelitian
14	Penelitian yang masih dalam proses

15	Dokumen Perjanjian Kerja Sama (MoA)
16	Hasil Notulensi Rapat yang sifat rahasia
17	Konfigurasi data center, disater recovery center, database dan aplikasi serta User Name dan password
18	Laporan Keuangan Universitas Sriwijaya yang belum diaudit (unaudited) oleh auditor internal dan eksternal

Tabel 1.3. Daftar informasi yang dikecualikan



Gambar 5. Alur Permohonan Informasi

Sumber: Diolah dari data sekunder oleh penulis, 2024

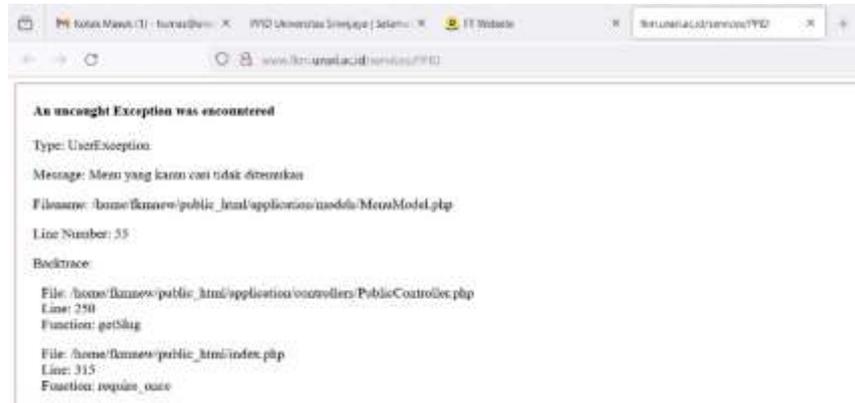
Berdasarkan gambar tersebut menunjukkan alur terkait permohonan oleh mahasiswa atau Masyarakat kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Universitas Sriwijaya. Pemohon diarahkan untuk datang ke meja layanan informasi untuk dimintai keterangan terkait informasi apa saja yang dibutuhkan kemudian selanjutnya diarahkan kepada PPID untuk dijelaskan terkait informasi yang dibutuhkan. Setelah pemohon puas akan kinerja PPID maka tugas selesai namun jika pemohon tidak puas maka akan ditindak lanjuti sesuai dengan prosedur yang berlaku,.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Universitas Sriwijaya sudah dilaksanakan pada tahun 2023 dengan landasan peraturan yang kuat yaitu melalui aturan Rektor Universitas Sriwijaya. Hal tersebut bertujuan supaya penyampaian informasi yang dibutuhkan oleh publik dapat dilakukan secara efektif dan maksimal. Para mahasiswa dan masyarakat tidak lagi berfokus pada satu layanan informasi pusat namun sudah bisa menjangkau melalui di tiap masing-masing fakultas. Dalam hal PPID di tiap fakultas bertanggungjawab penuh pada PPID pusat, tidak ada jaringan eksternal yang dilakukan oleh PPID Fakultas dalam melaksanakan tugasnya, sebaliknya PPID pusat bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan PPID di masing-masing Fakultas. Hampir sudah satu tahun berjalan, namun PPID di masing-masing fakultas belum menunjukkan peningkatan baik dari kualitas layanan kinerja ataupun jumlah pengunjung publik yang sebagai sasaran layanan. Para mahasiswa dan Masyarakat cenderung aktif mencari dan meminta informasi pada PPID pusat padahal layanan informasi di tiap Fakultas sudah disediakan supaya mereka lebih dijangkau. Hal tersebut menunjukkan adanya kesenjangan terkait pengelolaan layanan informasi publik oleh masing-masing PPID di tiap Fakultasnya.

Berdasarkan observasi awal dan fakta lapangan, dalam pelaksanaannya menunjukkan belum berjalannya sistem layanan informasi dan keterbukaan informasi publik di setiap fakultas. Padahal, terkait penugasan tersebut sudah di intruksikan sebagai pengembangan dari pusat informasi PPID Universitas kepada turunannya yaitu masing-masing fakultas di lingkungan universitas sriwijaya. Masing-masing Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di tiap fakultas masih banyak kendala baik itu dari sumber daya manusia, sarana dan prasana dan lain sebagainya.

Hasil wawancara awal yang sudah dilakukan dengan bapak Tomasno yang menjabat sebagai Koordinator Tata Usaha Fakultas Kesehatan Masyarakat, ia mengatakan “Terkait dengan Pengelolaan layanan informasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) terutama di fakultas Kesehatan Masyarakat ini adalah terkendala pada sumber daya manusianya, dimana disini belum ada operator atau petugas yang khusus untuk mengelolaa PPID. Hal tersebut karena

belum dibentuknya masing-masing petugas baik itu untuk mengelola Website, layanan pengaduan, Call center dan lainnya”.



Gambar 1.6. Website PPID Fakultas FKM Universitas Sriwijaya

Sumber: Website FKM Universitas Sriwijaya

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan belum adanya sumber daya manusia yang bertugas sebagai operator dalam mengelola website PPID fakultas dan dapat dilihat juga dari gambar diatas bahwasannya website PPID Fakultas FKM tidak dapat diakses karena tidak ada petugas yang menghandle web tersebut.

Dalam penyediaan Fasilitas baik sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan keterbukaan informasi juga menjadi salah satu faktor hambatan dalam pelaksanaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di masing-masing Fakultas. Hasil observasi awal dan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ahyatullah Komaini selaku Koordinator tata usaha Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya mengatakan bahwa “ Pengelolaan Pusat Informasi dan Dokumentasi terutama di Fakultas Teknik belum berjalan efektif dan maksimal, padahal saat ini Fakultas Teknik sudah mempunyai Unit Layanan Terpadu, hal tersebut dikarenakan belum adanya perhatian khusus dan media sarana sehingga tidak ada data informasi terkait Masyarakat atau mahasiswa yang berkunjung, selain itu sumber daya manusianya juga masih kurang. Padahal hal tersebut sudah diinstruksikan melalui SK rektor terkait dengan penyediaan pelayananan PPID”.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut bahwasannya belum ada perhatian khusus dalam mengembangkan dan meningkatkan pelayanan informasi melalui PPID masing-masing fakultas. Dapat disimpulkan bahwa sejauh ini masing-masing fakultas masih mempunyai kendala dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi baik itu terkait dengan sumber daya manusia, sarana, prasarana serta kurangnya monitoring dari pihak Universitas sehingga perlu dicari tahu apa yang melatarbelakangi hal tersebut.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan keterbukaan Informasi Publik melalui Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 01 Tahun 2023 pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Universitas Sriwijaya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukakan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

- A. Bagaimana implementasi kebijakan keterbukaan Informasi Publik melalui Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 01 Tahun 2023 pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Universitas Sriwijaya?
- B. Faktor apakah yang mempengaruhi implementasi kebijakan keterbukaan Informasi Publik melalui Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 01 Tahun 2023 pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Universitas Sriwijaya?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini yang hendak dicapai oleh penulis yaitu sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis implementasi kebijakan keterbukaan Informasi Publik melalui Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 01 Tahun 2023 pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

(PPID) di lingkungan Universitas Sriwijaya.

2. Untuk menganalisis apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan keterbukaan Informasi Publik melalui Peraturan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 01 Tahun 2023 pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Universitas Sriwijaya.

D. Manfaat Penelitian

Berikut penulis, menguraikan beberapa manfaat dari penelitian ini baik bagi penulis sendiri maupun pihak lain yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan administrasi publik khusus terkait implementasi kebijakan informasi publik pada layanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Universitas Sriwijaya.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini juga dapat memberikan gambaran yang jelas terkait pelaksanaan implementasi dan faktor-faktor yang menghambat eksistensi PPID Pada pelayanan informasi publik Universitas Sriwijaya serta dapat dijadikan bahan informasi maupun masukan/saran bagi pihak yang terkait

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini sebagai salah satu upaya mengembangkan kemampuan dan penguasaan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama menempuh perkuliahan pada program studi Ilmu Administrasi Publik di Universitas Sriwijaya.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat memberikan informasi serta dapat menjadi referensi mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Universitas Sriwijaya.

c. Bagi Universitas Sriwijaya/Stake Holder

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi atau masukan yang berguna dalam meningkatkan kualitas kinerja dari Pejabat

Pengelola Informasi dan Dokentasi (PPID) di lingkungan Universitas Sriwijaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Asep Saepul Hamdi dan E. Baharuddin. 2014. Metode Penelitian Kualitatif. Yogyakarta: Deepublish.
- Carl J. Friedrich Dalam Leo, 2008:3, Man and Hts Government, New York: McGraw, Hill.
- Dr.Arifin Tahir, M.Si., 2014, Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Daerah, Bandung, ALFABETA.
- Edward III. C. George. 1980. Implementation public policy. Washington: Congressional Q Press.
- Edwards III, George C. 2003. Implementing Public Policy. Jakarta.
- Hessel Nogi S. Tangkilisan, 2003. Implementasi kebijakan publik (Transformasi pikiran George Edward). Yogyakarta: Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia (YPAPI).
- Agustino, Leo. 2006. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Alfabeta : Bandung.
- Arikunto, S. 2013. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Publik. Jakarta : Rineka Cipta
- Ibrahim, Amin. 2008. Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya. Jakarta: Mandar Maju
- Lofland dan Lofland dikutip oleh Dr. Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Roskakarya, 2014
- Sinambela, Lijan Poltak. 2006. Reformasi Pelayanan Publik: Teori,Kebijakan, dan Implementasi. Jakarta: PT. Bumi Aksara

- Sampara Lukman. 2000. Manajemen Kualitas Pelayanan, Jakarta : STIA LAN Press
- Subarsono, AG. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2005
- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2003. Kebijakan Publik Yang Membumi. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Winarno, Budi. 2007. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta.
- Setyawan, D., & Srihardjono, N. B. (2016). Analisis Implementasi Kebijakan Undang-Undang Desa Dengan Model Edward Iii Di Desa Landungsari Kabupaten Malang. Reformasi, 6(2).
- Manyo'e, E. T. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Pelatihan Pola Satu Pintu Dengan Model Edward Iii Di Kabupaten Gorontalo. Knowledge: Jurnal Inovasi Hasil Penelitian Dan Pengembangan, 2(3), 227-240.
- Nugraheni, P. P., & Pramono, S. (2023). Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 56 Tahun 2022 Di Sekolah Dasar Negeri Tanah Kalikedinding Ii/252 Kota Surabaya. Soetomo Magister Ilmu Administrasi, 263-268.
- Amjah, A., Agustino, L., & Arenawati, A. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah. Jipags (Journal Of Indonesian Public Administration And Governance Studies), 6(1).
- Dalimunthe, Y. P., & Susilawati, S. (2022). Implementasi Kebijakan Vaksinasi Covid-19 Di Kota Medan Menggunakan Teori Edward Iii. Florona: Jurnal Ilmiah Kesehatan, 1(2), 59-64.
- Ismail, H. (2022). Studi Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Umkm Di Kabupaten Bojonegoro. Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Administrasi Negara Vol, 6(01).
- Nainggolan, E. M., Mardiana, S., & Adam, A. (2023). Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tentang Program Bela Pengadaan.

- Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi Dan Pelayanan Publik, 10(1), 1-16.
- Idrus, S., Ruhana, F., Amalia, M. R., Rosyid, A. F., & Kuswandi, D. (2023). Implementasi Kebijakan Manajemen Sumber Daya Manusia Yang Efektif Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Di Era Bisnis Global. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (Mea)*, 7(1), 72-89.
- Ramadhan, S., & Megawati, S. (2023). Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Mahasiswa Di Universitas Negeri Surabaya. *Publika*, 1581-1592.
- Lumingkewas, E., & Supit, B. F. (2023). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Minahasa. *Academy Of Education Journal*, 14(2), 1106-1116.
- Aisah, H., Zaqiah, Q. Y., & Supiana, A. (2021). Implementasi Kebijakan Asesmen Kemampuan Minimum (Akm): Analisis Implementasi Kebijakan Akm. *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 1(2), 128-135.
- Luturmas, Y., Diana, E., Abdusshomad, A., & Wiranata, R. R. S. (2022). Implementasi Struktur Kurikulum Berdasarkan Kemendikbudristek No 371/M/2021 Dan Pp No 57 Tahun 2021 Pada Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (Rpp) Tahun Ajaran 2022/2023 Di Madrasah Ibtidaiyah. *Jurnal Multidisipliner Bharasa*, 1(2), 71-81.
- Ernawati, K., Fadilah, M. R., Rachman, M. A., Nadira, C., Sartika, P. A. J., Jannah, F., & Komalasari, R. (2022). Implementasi Kebijakan Program Pengendalian Demam Berdarah Dengue Di Puskesmas Kresek, Kabupaten Tangerang. *Public Health And Safety International Journal*, 2(02), 140-145.
- Karundeng, A. B., Kaawoan, J. E., & Pangemanan, S. E. (2021). Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) Di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro. *Governance*, 1(2).
- Rozikin, M., Harmini, F. P., & Wiradita, A. (2020). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Perguruan Tinggi (Studi Pada

- Universitas Negeri Malang). *Metacommunication: Journal Of Communication Studies*, 5(2), 129.
- Chairunnisa, L., Habibi, F., & Berthanila, R. (2023). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara Asian (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, 11(2), 31-45.
- Nadia, N. K., & Arif, E. (2022). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (Studi Pada Website Ppid Desa Sidodadi Kabupaten Mukomuko). *Jurnal Komunikatio*, 8(1), 29-42.
- Laksana, D. P. (2023). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik Di Kecamatan Bojongsoang Kabupaten Bandung (Doctoral Dissertation, Perpustakaan).